

**SIKAP NETRAL INDONESIA PADA KASUS UIGHUR DALAM
HUBUNGAN BILATERAL DENGAN TIONGKOK 2018-2019**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MUHAMMAD SHAFLY MUWAFFAQ

18323138

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**SIKAP NETRAL INDONESIA PADA KASUS UIGHUR DALAM
HUBUNGAN BILATERAL DENGAN TIONGKOK 2018-2019**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

MUHAMMAD SHAFLY MUWAFFAQ

18323138

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Sikap Netral Indonesia pada Kasus Uighur dalam Hubungan Bilateral dengan Tiongkok Tahun 2018-2019

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan
Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam
memperoleh derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan
Internasional Fakultas Psikologi dan
Ilmu Sosial Budaya Universitas
Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Gustrieni Putri, S.I.P., M.A.
- 2 Muhammad Zulfikar Rakhmat, Ph.D.
- 3 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

[Signature]
[Signature]
[Signature]

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

25 Agustus 2023



Muhammad Sharly Muwaffaq

Tanda tangan dan nama lengkap mahasiswa

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
ABSTRAK.....	1
BAB I	
PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Cakupan penelitian.....	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Kerangka Pemikiran.....	10
1.7 Argumen Sementara.....	15
1.8 Metode Penelitian.....	15
1.8.1 Jenis Penelitian	15
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	16
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	16
1.8.4 Proses Penelitian.....	16
1.9 Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II	
ALASAN	
INDONESIA MEMERLUKAN TIONGKOK DARI FAKTOR UKURAN, SUMBER DAYA ALAM, DAN GEOGRAFI.....	19
2.1 Faktor Ukuran Wilayah Negara Indonesia yang Menyebabkan Indonesia Bersikap Netral terhadap Kasus Uighur dalam Hubungan Bilateral dengan Tiongkok.....	19
2.2 Faktor Sumber Daya Alam Indonesia yang Menyebabkan Indonesia bersikap Netral terhadap Kasus Uighur dalam Hubungan Bilateral dengan Tiongkok.....	23
2.3 Faktor Geografi Wilayah Indonesia yang Menyebabkan Indonesia Bersikap Netral terhadap Kasus Uighur dalam Hubungan Bilateral dengan Tiongkok.....	25
BAB III	
ALASAN	
INDONESIA MEMERLUKAN TIONGKOK DARI FAKTOR DEMOGRAFI,	

SISTEM POLITIK, KEMAMPUAN MILITER, DAN KEMAMPUAN EKONOMI.....	27
3.1 Faktor Demografi Wilayah Indonesia yang Menyebabkan Indonesia Bersikap Netral terhadap Uighur dalam Hubungan Bilateral dengan Tiongkok 27	
3.2 Faktor Sistem Politik Indonesia yang Menyebabkan Indonesia Bersikap Netral terhadap Uighur dalam Hubungan Bilateral dengan Tiongkok.....	29
3.3 Faktor Kemampuan Militer Indonesia yang Menyebabkan Indonesia Bersikap Netral terhadap Uighur dalam Hubungan Bilateral dengan Tiongkok 31	
Tabel 1. Ranking Kekuatan Militer Dunia 2018.....	33
3.4 Faktor Kemampuan Ekonomi Indonesia yang Menyebabkan Indonesia Bersikap Netral terhadap Uighur dalam Hubungan Bilateral dengan Tiongkok 34	
BAB IV	38
PENUTUP.....	38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Rekomendasi	42
DAFTAR PUSTAKA	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ranking Kekuatan Militer Dunia Tahun 2018

Tabel 2. Data Nilai Impor Indonesia dari Tiongkok Tahun 2014-2018

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam menanggapi isu Uighur akibat kondisi politik dalam negeri yang tidak mendukung tindakan pemerintah. Dalam masalah ini pemerintah bersikap netral karena Tiongkok memiliki power yang lebih kuat pada indikator-indikator yang dimiliki negara sesuai pemikiran Valerie M. Hudson yaitu ukuran, sumber daya alam, geografi, demografi, sistem politik, kemampuan militer, dan kemampuan ekonomi. Kedekatan pemerintah dengan Tiongkok dinilai karena kebergantungan pemerintah saat ini pada Tiongkok sehingga bersikap netral dalam menanggapi isu Uighur. Hasil analisis dari pemikiran Valerie M. Hudson, Indonesia memiliki ukuran dan sumber daya alam yang lebih kecil dan sedikit daripada Tiongkok. Geografis Indonesia yang memiliki banyak perbatasan sehingga terjadi konflik seperti sengketa perairan Natuna, Demografi Indonesia yang melekat nilai-nilai Islam sangat kuat sehingga mempengaruhi hubungan dengan Tiongkok. Terjadi perselisihan antara Islam dengan Tiongkok Minded dalam sistem perpolitikan. Kemampuan militer dan ekonomi Indonesia kalah jauh dari Tiongkok.

Kata kunci: Pemerintah Tiongkok, Uighur, politik luar negeri, pemerintah Indonesia, Netral,

ABSTRACT

The Indonesian government is experiencing difficulties in responding to the Uyghur issue due to domestic political conditions that do not support government action. In this matter the government is neutral because China has stronger power on the indicators owned by the country according to Valerie M. Hudson's thinking, namely size, natural resources, geography, demography, political system, military capabilities, and economic capabilities. The government's closeness with China is considered due to the current government's dependence on China so that it is neutral in responding to the Uyghur issue. The results of the analysis of Valerie M. Hudson's thoughts, Indonesia has a size and natural resources that are smaller and less than China. Indonesia's geography has many borders causing conflicts such as the Natuna waters dispute. Indonesia's demographics have very strong Islamic values that affect relations with China. There is a dispute between Islam and China Minded in the political system. Indonesia's military and economic capabilities are far behind China's.

Keywords: Chinese Government, Uyghur, foreign policy, Indonesian government, Neutral,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus Uighur merupakan konflik antara masyarakat Uighur dengan pemerintah Tiongkok yang menjadi problematika bagi politik dalam negeri Indonesia dimana banyak masyarakat Indonesia meminta pemerintah Indonesia tegas mengambil sikap kepada pemerintah Tiongkok. Tiongkok memiliki umat muslim sejumlah 1,7% dari total keseluruhan masyarakat muslim Tiongkok menurut data sensus Tiongkok yang dibuat oleh Biro Statistik Nasional Tiongkok (Lee, 2015)

Islam telah masuk ke wilayah Tiongkok sejak abad ketujuh ketika Dinasti Tang berkuasa sehingga berkembang pesat di Tiongkok dengan adanya pembangunan masjid yang dekat dengan pelabuhan perdagangan Selatan Guangzhou dimana orang-orang Persia dan Arab melakukan pelayaran di area Samudera Hindia dan Laut China Selatan. Abad ke 13 ketika Dinasti Mongol berkuasa, Gengis Khan membawa ribuan umat muslim dari Asia Tengah dan Persia untuk dipekerjakan dalam kegiatan administrasi pemerintahannya karena minimnya pengalaman. Nasib umat muslim imigran berubah ketika Dinasti Ming berkuasa dari tahun 1644 sampai tahun 1911 dimana pemerintah memperlakukan keberadaan umat muslim imigran sehingga pemerintah memberlakukan perlakuan represif kepada para imigran sebab takut terjadi banyak pemberontakan. Tiongkok pun mengumumkan kemerdekaannya dengan negara bernama Republik Rakyat China yang terdiri dari 56 kelompok etnis diantaranya ada 10 kelompok etnis islam minoritas; yaitu Hui, Uighur, Kazakh, Dongxiang, Kyrgyz, Salar, Tajik, Uzbek, Bonan, dan Tatar. Namun, revolusi besar yang

dilakukan pemerintah Tiongkok dengan menjadikan negaranya sebagai negara komunis menyebabkan umat muslim terusik sebab pemerintah Tiongkok melarang peribadatan bagi umat muslim serta menganggap agama sebagai ancaman bagi negara. (Dewi, 2020).

Penduduk suku Uighur mendirikan negara bernama Republik Turkestan Timur di wilayah Xinjiang pada tahun 1940-an serta menganggapnya sebagai HAM bagi mereka. Akan tetapi, hal itu dibantah dengan berdirinya RRC pada tahun 1949 yang memasukkan Xinjiang sebagai wilayahnya. Pemerintah Tiongkok dibawah kendali Partai Komunis membangun perekonomian di Xinjiang secara masif dan warga Tiongkok bagian Timur pindah ke Xinjiang karena tertarik untuk mencari kehidupan yang baik. Suku Han yang memiliki kemampuan bahasa Mandarin membuat mereka banyak diterima untuk bekerja sehingga menimbulkan ketimpangan sosial antara suku Uighur dengan suku Han di Xinjiang. Penduduk suku Uighur berusaha mencari pekerjaan di luar Xinjiang tetapi tidak berhasil dikarenakan wanita dijadikan budak jika keluar dari wilayahnya menuju wilayah Tiongkok lainnya. Selain itu, pemerintah Komunis China melakukan diskriminasi terhadap penduduk suku Uighur dengan pembatasan dalam melakukan peribadatan agama mereka.

Usai runtuhnya Uni Soviet dan negara-negara muslim, mulai bermunculan pada tahun 1990-an kelompok-kelompok separatisme mulai bermunculan di Xinjiang. Pada tahun 1995 dan 1997, demonstrasi massal yang dilakukan di Ghulja yang menjadi puncak dari gerakan kelompok-kelompok separatisme. Pemerintah Komunis China memberlakukan kebijakan “Strike Hard” pada tahun 1996 yang membatasi kegiatan agama dan gerakan-gerakan

yang mencurigakan, larangan pembuatan paspor dan menahan orang-orang yang terlibat dalam gerakan separatisme beserta keluarganya. Pemerintah Komunis China juga memberlakukan kebijakan Go West Policy di tahun 2000 yang menimbulkan banyaknya pelanggaran HAM di Xinjiang. Ketimpangan sosial yang begitu tajam dan perlakuan keras dari kelompok militer yang terjadi di Xianjiang membuat penduduk suku Uighur untuk memerdekakan diri dengan melakukan gerakan-gerakan separatisme di Xianjiang. Akan tetapi, pemerintah Komunis China tidak ingin melepas satu wilayah pun dari Tiongkok dengan prinsipnya One China Policy yang mementingkan kedaulatan Tiongkok. Selain itu, pemerintah Komunis China tidak ingin kehilangan Xinjiang karena wilayah tersebut sangat berpengaruh bagi perekonomian Tiongkok (Karisma).

Hubungan Indonesia dengan Tiongkok sudah dalam terjalin sejak Presiden Soekarno memimpin. Namun hubungan itu sempat renggang pada masa Presiden Soeharto karena sikap politiknya berbeda dengan Soekarno. Setelah waktu berjalan, hubungan keduanya kembali pulih hingga masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin pemerintahan. Hubungan itu terus berlanjut hingga Presiden Joko Widodo memimpin bahkan menjadi lebih dekat. Hubungan dekat itu terlihat dengan adanya kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tiongkok dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC pada tanggal 8 November 2014 yang menjadikan Tiongkok sebagai negara pertama yang dikunjungi olehnya. Dalam kunjungan itu, Presiden Joko Widodo telah menyepakati proyek buatan Tiongkok yang dinamai Silk Road China serta mendukung terbentuknya AIIB sebagai bank yang mendanai proyek Tiongkok tersebut (Andika, 2017).

Silk Road China merupakan proyek Tiongkok yang bertujuan untuk membuat hubungan Tiongkok dengan negara-negara di Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Hubungan dekat itu terlihat semakin kuat sebab Presiden Joko Widodo menghadiri perayaan 65 tahun hubungan bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok. Dalam perayaan itu, Presiden Joko Widodo dengan Presiden Tiongkok bernama Xi Jinping membicarakan kerjasama ekonomi Indonesia-Tiongkok yang mencakupi perdagangan, keuangan, infrastruktur, industri, pariwisata, dan koneksi antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Tiongkok (Andika, 2017).

Pemerintah Tiongkok yang menginginkan hubungan bilateral dengan Indonesia semakin erat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal terdiri 3 poin; antara lain: 1) Kebangkitan ekonomi Tiongkok; 2) OBOR - One Belt and One Road; 3) Kegagalan Amerika Serikat. Sedangkan faktor internalnya ialah kebutuhan Indonesia akan proyek infrastruktur, indiosinkratik atau psikologi seorang pemimpin, dan orientasi politik luar negeri yang ditujukan oleh seorang pemimpin (Andika, 2017).

Pertama, kebangkitan ekonomi Tiongkok merupakan waktu dimana pemerintah Tiongkok era Deng Xiao Ping (1978-1987) mulai memberlakukan perdagangan terbuka kepada negara-negara lain sehingga membuat perekonomian Tiongkok semakin membaik dari masa perdagangan tertutup. Kedua, proyek OBOR ditujukan untuk membuat jalur dagang barat dan laut yang akan menghubungkan Asia dengan Eropa. Ketiga, kegagalan Amerika Serikat dalam mempertahankan kekuatannya di Asia. Pemerintah Amerika Serikat sempat ingin memperbaiki kesalahannya tersebut namun tidak berhasil sehingga membuat Tiongkok dapat memanfaatkan kesalahan itu. Sedangkan faktor

internalnya ada 3 poin. Pertama, kurang mampunya pemerintah Indonesia dalam membangun infrastruktur serta melihat Indonesia dapat menjadi Asian Tiger membuat pemerintah Tiongkok ingin memberikan bantuan ekonomi yang sejalan dengan proyek OBOR dengan mendanai pembangunan infrastruktur tersebut seperti pengadaan kereta api cepat. Kedua, indiosinkratik atau psikologi seorang pemimpin yang diperlihatkan oleh Presiden Joko Widodo dimana sikapnya dekat dengan pemerintah Tiongkok. Orientasi politik luar negeri dari Presiden Joko Widodo yang dinamai “Diplomasi membumi” atau “Diplomasi pro-rakyat” memaknai bahwa diplomasi antara Indonesia dengan Tiongkok perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang belum mampu diberikan secara merata (Andika, 2017).

Indonesia memiliki sejarah Islam yang sangat panjang sejak kemerdekaannya sebab negara ini didirikan oleh perjuangan umat muslim sebagai salah satu pelakunya. Tidak mengejutkan bila gelombang suara umat muslim mengalami pasang surut selama Indonesia mulai merdeka. Banyak peristiwa-peristiwa yang kadang membangkitkan gerakan-gerakan Islam di Indonesia, salah satunya Gerakan 212. Gerakan 212 bermula dari demonstrasi yang terjadi karena Ahok menista agama Islam dimana ia menyinggung ajaran Islam yaitu surat Al-Maidah ayat 51. Kemudian gerakan ini berlanjut hingga 2019 sehingga tahun 2018 dan 2019 menjadi waktu yang dibahas pada tulisan ini (Adam, 2022),

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Indonesia memilih kebijakan netral terhadap kasus Uighur pada tahun 2018-2019 dalam hubungan bilateral dengan Tiongkok?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuannya dilakukan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengapa Indonesia memilih bersikap netral terhadap kasus Uighur pada tahun 2018-2019 meskipun pemerintah Indonesia telah mendapat kritik maupun protes dari berbagai elemen masyarakat sehingga memengaruhi kondisi politik dalam negeri.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini membahas bagaimana kebijakan politik luar negeri pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2018-2019 dalam menanggapi konflik antara pemerintah Tiongkok dengan masyarakat Uighur. Konflik Uighur yang semakin meluas beritanya membuat konflik ini menjadi sorotan masyarakat dunia pada masa saat itu karena keberadaan teknologi yang semakin canggih membuat masyarakat dunia dapat mengakses internet untuk mengetahui konflik tersebut. Penelitian ini menetapkan masa pemerintahan Jokowi tahun 2018-2019 menjadi pembahasan yang diangkat pada tulisan ini karena pada masa itulah isu Uighur menjadi pembicaraan banyak masyarakat Indonesia bahkan mereka banyak melakukan demonstrasi di berbagai daerah Indonesia. Isu ini menarik untuk dibahas sebab bangkitnya elemen dark umat muslim Indonesia pada tahun 2017 dengan terjadinya perkumpulan umat muslim yang dikenal dengan Gerakan 212 di Monumen Nasional dimana masyarakat Indonesia menuntut pemerintah agar Ahok dihukum karena telah melakukan penistaan agama terhadap agama Islam dengan menyalahkan ajaran Al-Qur'an pada surat Al-Maidah ayat 51. Demonstrasi Gerakan 212 itu dinilai berhasil setelah Ahok divonis bersalah dan dihukum dalam kasus penistaan agama. Dengan keberhasilan itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa terganggu apabila pemerintah salah mengambil sikap terhadap isu Uighur

sebab pada tahun 2018-2019 sudah banyak terjadi demonstrasi di berbagai daerah Indonesia yang mendesak pemerintah tegas mengambil sikap terhadap pemerintah Tiongkok. Alasan penelitian ini sampai tahun 2019 karena demonstrasi masih terjadi demonstrasi namun sudah mulai berkurang.

1.5 Tinjauan Pustaka

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok sudah terjalin baik sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, hubungan keduanya menjadi lebih erat ketika ia memimpin. Dalam jurnal yang berjudul “Dinamika Hubungan Kerja Sama Indonesia-Cina di Era Pemerintahan Joko Widodo” dijelaskan bahwa Tiongkok menjadi mitra penting dalam kegiatan perdagangan Indonesia dimana kerjasama antara kedua negara tidak hanya sektor ekonomi namun sektor politik sampai sektor keamanan pun mulai terjalin. Dalam karya tulis tersebut, konsep yang digunakan ialah pendekatan neoliberalisme dimana rezim internasional mengatur bagaimana kerjasama antar negara berjalan. Menurut penganut neoliberalisme, kerjasama antar negara dapat menjadi inventasi yang memberi keuntungan bagi negara seperti proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) dan *One Belt One Road* (OBOR) (Dinamika Hubungan Kerja Sama Indonesia-Cina di Era Pemerintahan Joko Widodo, 2019). Dengan pendekatan neoliberalisme itu, Indonesia ingin mendapatkan keuntungan dari kerjasama dengan Tiongkok berupa proyek KCIC dan OBOR untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

Jurnal yang berjudul “Diplomasi Ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok pada Masa Kabinet Kerja 2014-2019 menerangkan bahwa Indonesia menjadikan Tiongkok sebagai negara mitra penting bagi perekonomian Indonesia dimana

diplomasi ekonomi menjadi konsep yang digunakan dalam risetnya. Dalam jurnal itu, diplomasi ekonomi yang digunakan Indonesia terdapat empat tahap. Pertama, economic salesmanship yang dilaksanakan dengan membuat iklan yang terkait perdagangan dan investasi. Kedua, economic networking and advocacy yang menggunakan aktor-aktor non negara dalam mempromosikan kepada negara lain. Ketiga, image building dengan nation branding dimana Wonderful Indonesia menjadi suatu brand yang digunakan untuk meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Keempat, regulatory management and resources mobilization dengan membentuk Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) guna meningkatkan peran UMKM di pasar domestik (Mardhiyyah, 2023). Dengan empat tahap diplomasi ekonomi, Indonesia ingin produk dalam negeri dapat laku dijual kepada masyarakat Tiongkok umumnya serta meningkatkan peran UMKM dalam negeri untuk menjual serta bersaing dengan produk luar negeri terutama Tiongkok.

Kerjasama antar negara terbentuk oleh adanya konflik berhubungan antar satu dengan yang lain. Hal itu dijelaskan dalam jurnal yang berjudul “Analisis Kerjasama Bilateral Sosial Politik China dan Indonesia dalam Masa Kepemimpinan Joko Widodo 2014-2020” dimana konflik itu akan membuat negara-negara satu dengan negara lain saling membutuhkan. Perlunya saling membutuhkan memunculkan hubungan bilateral dalam politik internasional. Indonesia telah lama melakukan hubungan bilateral dengan Tiongkok dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Dalam bidang sosial dan pendidikan, Indonesia mengadakan bahasa mandarin sebagai salah satu bahasa yang dapat dipelajari dan diujikan di berbagai daerah Indonesia serta menyediakan beasiswa bagi para pelajar (Munatama, 2023). Dengan demikian, Indonesia

menunjukkan tidak hanya pemerintah yang dapat melakukan diplomasi antar negara tetapi setiap individu dapat melakukannya.

Ketiga jurnal diatas terdapat perbedaan dengan penelitian ini dalam konsep dan analisis dimana ketiganya menggunakan analisis pendekatan. Jurnal pertama menggunakan konsep pendekatan neoliberalisme yang bertujuan untuk mencapai keuntungan bagi negara berupa investasi dan proyek infrastruktur. Jurnal kedua memakai pendekatan diplomasi ekonomi yang terdiri dari empat dimana aktor negara dan non negara berbagi perannya dalam memperkenalkan citra Indonesia kepada masyarakat negara lain dengan produk Bernama Wonderful Indonesia. Jurnal ketiga menjelaskan bagaimana negara itu saling bekerja sama oleh adanya konflik sehingga negara dengan negara lain saling membutuhkan serta menunjukkan bahwa individu dapat melakukan diplomasi antar negara. Pada penelitian ini, penulis ingin menerangkan bahwa negara tidak hanya saling membutuhkan tetapi negara yang menjalin hubungan dengan negara lain dapat disebabkan oleh negara tersebut itu takut dengan negara lain karena memiliki power yang lebih besar dari negara itu sendiri. Penulis belum menemukan karya tulis lain yang membahas sama seperti penelitian ini sehingga penulis ingin melakukan riset ini dengan pemikiran Valerie M. Hudson.

1.6 Kerangka Pemikiran

Negara terdiri dari kumpulan banyak orang yang menyerukan untuk bersatu guna mendirikan pemerintahan satu secara sah dimana pemerintahan digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam aktivitas hariannya. Dengan begitu, sifat negara sama seperti sifat manusia pada umumnya yang membutuhkan satu sama lain untuk melengkapi kebutuhan hidup masing-masing karena manusia

memiliki kelebihan serta kekurangan yang berbeda-beda. Suatu negara akan membutuhkan negara lain karena negara itu memiliki suatu kekurangan sehingga meminta bantuan kepada negara lain. Contohnya, seorang guru membutuhkan bantuan dari seorang tukang bengkel ban karena ban motornya bocor ketika ia bepergian ke sekolah. Guru itu membutuhkan bantuan tukang bengkel karena ia tidak mampu serta memiliki peralatan untuk menambal ban sehingga ia meminta bantuan kepada orang yang mampu serta memiliki peralatan untuk menambal ban tersebut. Hal itu juga biasa terjadi pada setiap negara yang tidak memiliki kemampuan tertentu sehingga negara berkepentingan akan meminta bantuan negara lain guna menanggapi kekurangan tersebut. Sifat saling membutuhkan antara negara akan selalu berlaku seperti manusia yang bergantung kepada orang lain dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Setiap manusia memiliki kebutuhannya masing-masing dan berbeda-beda satu dengan yang lain. Kebutuhan manusia tidak dapat disamakan secara keseluruhan karena manusia memiliki batas-batas tertentu dalam menggapai suatu target. Tidak semua manusia memiliki target yang sama begitu juga dengan negara dalam memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Oleh karena itu, setiap negara memiliki kebutuhan dan target sendiri-sendiri sesuai apa yang diperlukan. Ada suatu negara yang tidak memiliki sumber daya alam karena keadaan geografisnya tidak mendukung sehingga membutuhkan sumber daya alam dari negara lain. Kemudian, pemerintah negara itu ingin melakukan kerjasama dengan negara yang kaya akan sumber daya alam agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya yaitu kebutuhan bagi rakyatnya. Negara memiliki tanggungjawab besar dalam memenuhi segala kebutuhan rakyat karena negara berdiri dari rakyat. Dengan

demikian, negara akan selalu membutuhkan bantuan dari negara lain karena tidak ada negara yang mampu memiliki segalanya tanpa bantuan negara lain.

Tulisan ini ingin menjelaskan konsep dari Valerie M.Hudson tentang pembuatan kebijakan luar negeri bagi suatu pemerintah negara. Membuat kebijakan tidak boleh dibuat tanpa perhitungan yang matang sehingga memerlukan parameter-parameter penting untuk menentukan sikap pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Ada beberapa parameter dari Valerie M.Hudson dalam membuat kebijakan luar negeri; antara lain: ukuran, sumber daya alam, geografi, demografi, sistem politik, kemampuan militer, dan kemampuan ekonomi. Ukuran merupakan besaran wilayah dari suatu negara secara keseluruhan. Tiongkok yang memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari Indonesia menjadikan negaranya lebih memiliki pengaruh lebih karena memiliki sumber daya alam yang lebih melimpah sehingga power Tiongkok lebih besar untuk menekan Indonesia. Sumber daya alam berupa kekayaan alam dari tumbuh-tumbuhan, hewan dan lingkungan. Memenuhi kebutuhan nasional itu bergantung pada sumber daya alam. Kebutuhan nasional akan selalu bertambah seiring waktu berjalan sehingga suatu negara akan membutuhkan negara lain demi memenuhi kebutuhan tersebut. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Tiongkok menghasilkan jumlah yang lebih banyak dibandingkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sehingga Indonesia cenderung lebih membutuhkan Tiongkok karena sumber daya alamnya yang lebih melimpah. Geografi menunjukkan bagaimana bentuk daratan dan lautan dari suatu wilayah. Masing-masing negara memiliki geografis yang beragam; seperti wilayah yang terdapat gunung berapi, padang pasir, lautan dan sebagainya. Negara memiliki batas wilayahnya supaya sumber hasil kekayaan alamnya tidak dapat diambil oleh

negara lain. Semakin banyak batas negara, maka akan semakin ada konfliknya. Dalam hal batas negara, Indonesia memiliki banyak batas negara termasuk dengan Laut China Selatan dimana laut tersebut juga berbatasan langsung oleh wilayah Tiongkok. Jika Indonesia berani melawan Tiongkok secara terang-terangan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa Tiongkok mampu untuk mencaplok batas wilayah Indonesia sehingga hal itu membuat Indonesia takut dengan Tiongkok. Selain itu, Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan Australia serta di antara samudera hindia dan pasifik tentu membuat wilayah Indonesia menjadi jalur penting dalam perdagangan dunia. Dalam hal ini, Indonesia yang memiliki kebergantungan dengan Tiongkok tidak ingin berselisih dengan Tiongkok sebab jika Indonesia menutup wilayahnya yang merupakan jalur perdagangan dunia maka Indonesia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan domestiknya pada Tiongkok.

Demografi merupakan bagaimana kondisi Masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu. Demografi ditentukan oleh jumlah populasi manusia di wilayah tertentu. Terdapat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat seperti usia manusia, jenis kelamin, kesehatan, agama dan lain sebagainya. Indonesia dikenal dengan negara mayoritas masyarakat muslim sehingga agama menjadi pengaruh besar bagi pemerintah Indonesia dalam menanggapi isu Uighur. Dengan bangkitnya suara-suara Islam dalam beberapa tahun kebelakang, pemerintah Indonesia memilih bersikap netral terhadap isu Uighur karena jika pemerintah salah mengambil sikap maka stabilitas pemerintahan dapat tergoncang oleh pengaruh Islam. Pemerintah Indonesia ingin menghindari gelojak dalam negeri dan juga meneruskan hubungan eratnya dengan Tiongkok sehingga bersikap netral menjadi pilihan alternatif bagi pemerintah Indonesia

dalam menyikapi persoalan Uighur. Sistem politik merupakan bentuk bagaimana masyarakat diatur oleh pemerintahnya. Indonesia menggunakan sistem demokrasi dalam pemerintahannya dimana masing-masing orang memiliki haknya masing-masing dalam memilih apa yang diinginkannya. Pemerintahan Presiden Joko Widodo diketahui dekat dengan pemerintah Tiongkok sebab banyaknya kerjasama yang sudah terjalin di antara kedua negara. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang taat beragama khususnya Islam karena ibadah masyarakatnya yang rajin. Konflik domestik antara pemerintah yang dekat dengan Tiongkok dengan masyarakat Indonesia yang agamis merupakan masalah domestik Indonesia dalam menanggapi isu Uighur dimana masyarakat yang agamis menekan pemerintah yang berhubungan erat dengan Tiongkok untuk bertindak tegas. Semakin banyak populasi maka semakin sulit bagi pemerintah untuk mengontrol rakyatnya. Dalam hal ini, apabila pemerintah Indonesia tidak mampu mengendalikan kemarahan masyarakat yang agamis maka stabilitas politik domestik dalam goyah. Pemerintah Indonesia takut kekuasaannya akan tergoyah tetapi juga takut hubungan dengan Tiongkok menjadi renggang sehingga bersikap netral menjadi jalan tengah dalam menanggapi itu Uighur.

Kemampuan militer menjadi salah satu aset penting bagi negara dalam menciptakan keamanan bagi wilayahnya. Militer dinilai sebagai alat paling mudah dalam menjaga dan memenuhi kepentingan nasional. Indonesia memiliki kekuatan militer yang lebih lemah dari Tiongkok membuat Indonesia tidak mampu untuk berselisih dengan Tiongkok karena jika keduanya berkonflik maka kebutuhan serta kepentingan nasional Indonesia tidak mampu dicapai. Kemampuan ekonomi menggambarkan bagaimana pemerintah suatu negara mengatur pemerintahannya

dan kehidupan rakyatnya. Tiongkok tercatat sebagai negara impor terbesar bagi Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia tidak ingin kedekatannya dengan Tiongkok menjadi renggang karena isu Uighur. Apabila hubungan itu renggang, maka sebagian besar kebutuhan impornya akan hilang sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Dengan demikian, Indonesia tidak dalam kondisi yang lebih menguntungkan daripada Tiongkok sebab Indonesia kalah dari Tiongkok dalam ketujuh indikator tersebut.

1.7 Argumen Sementara

Indonesia memiliki hubungan begitu erat dengan Tiongkok sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal itu begitu terlihat pada kerjasama dalam hubungan bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok dimana banyak aspek yang ditambahkan dalam kesepakatan kerjasama tersebut. Ketika masyarakat Indonesia mulai melakukan demonstrasi kepada pemerintah dengan mendesak untuk bertindak tegas pada konflik Uighur, pemerintah justru bersikap netral tanpa perlu mengambil tindakan lain. Sikap netral itu kerap dikritik oleh berbagai elemen masyarakat Indonesia karena pemerintah dinilai tidak tegas serta terlalu bergantung pada Tiongkok. Kebergantungan itu dapat dianalisa dengan tujuh indikator dari pemikiran Valerie M. Hudson dimana Indonesia tidak diuntungkan dalam ketujuh indikator tersebut sehingga Indonesia dinilai takut dengan Tiongkok.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada pembahasan ini ialah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini membutuhkan informasi-informasi yang terdapat dalam buku, jurnal dan beberapa media massa seperti website untuk

mengumpulkan informasi-informasi yang digunakan pada penelitian ini karena penelitian ini berfokus pada kata-kata untuk menjelaskan objek penelitian tersebut.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari beberapa informasi yang bersumber pada buku dan media massa (website). Penelitian ini mencari informasi hal apa yang terkait dengan pokok pembahasan penelitian ini agar dapat menjelaskan lebih rinci mengapa pemerintah Indonesia memilih bersikap netral dalam konflik pemerintah Tiongkok dengan penduduk suku Uighur. Subjek penelitian ialah pemerintah Indonesia sedangkan objeknya ialah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah mencari informasi-informasi yang terkait konflik antara Tiongkok dengan Uighur, kebijakan pemerintah Indonesia dan pengaruh Tiongkok terhadap pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia yang terdapat dalam buku, jurnal dan media massa berbentuk website agar dapat menjelaskan maksud dari tulisan ini sehingga bisa diterima, dipahami dan dimengerti oleh pembacanya.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari beberapa informasi yang bersumber pada buku dan media massa (website). Penelitian ini mencari

informasi hal apa yang terkait dengan pokok pembahasan penelitian ini agar dapat menjelaskan lebih rinci bagaimana pengaruh Tiongkok terhadap pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia dalam konflik pemerintah Tiongkok dengan penduduk suku Uighur.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab 1 berisikan tentang latar belakang terkait pertikaian antara pemerintah Tiongkok dengan penduduk suku Uighur dalam politik dunia internasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian dan sistematika yang menjelaskan secara singkat sedikit gambaran tentang segala sesuatu berkaitan dengan judul pembahasan ini.

Bab 2 membahas implementasi teori dari beberapa indikator; antara lain: ukuran wilayah negara, sumber daya alam, dan geografi. Ukuran wilayah negara merupakan seberapa besar jumlah luas yang dimiliki suatu negara baik daratan maupun lautan. Semakin besar ukuran wilayahnya, negara akan mendapatkan hasil alam lebih besar dari negara lain yang memiliki ukuran wilayah lebih kecil jika pemerintahannya mampu memanfaatkannya dengan baik. Ukuran wilayah akan memengaruhi besarnya sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara. Sumber daya alam menjadi suatu kebutuhan pokok negara dalam memenuhi kehidupan rakyatnya sekaligus motor pergerakan bagi perekonomian negara. Macam-macam sumber daya alam yang dihasilkan dipengaruhi oleh bagaimana geografi yang terletak di wilayah negara tertentu. Oleh karena itu, hasil alam yang dihasilkan dari sumber daya alam akan berbeda antara negara

satu dengan negara lainnya; antara lain: hasil yang melimpah, hasil yang sedikit, dan tidak memiliki hasil karena pengaruh geografi.

Bab 3 berisikan penjelasan implementasi teori dari demografi, sistem politik, kemampuan militer, dan kemampuan ekonomi. Demografi merupakan gambaran besar bagaimana kondisi masyarakat hidup di wilayah suatu negara tertentu. Kondisi masyarakat ini sangat memberikan pengaruh besar dalam berjalannya pemerintahan suatu negara sehingga sistem politik di negara tertentu akan bergantung dengan demografi dari negara yang bersangkutan. Sistem politik merupakan sistem pemerintahan yang mengatur kehidupan masyarakat di wilayah negara tertentu. Sistem yang dianut negara akan memengaruhi kemampuan militer dan ekonomi negara terkait. Sistem politik akan mengatur bagaimana suatu pemerintahan mengelola negaranya dalam sektor militer dan ekonomi.

BAB II

ALASAN INDONESIA MEMERLUKAN TIONGKOK DARI FAKTOR UKURAN, SUMBER DAYA ALAM, DAN GEOGRAFI

Indonesia memiliki hubungan dengan Tiongkok sudah sejak pemerintahan Presiden Soekarno. Namun, hubungan keduanya menjadi terlihat spesial pada pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 hingga saat ini. Hal itu dapat dibuktikan dengan bagaimana pemerintahan Presiden Joko Widodo begitu gencar dalam hubungan bilateral dengan meningkatkan kerjasama di berbagai sektor; seperti investasi, ekspor-impor, dan sektor-sektor lainnya. Dalam kasus Uighur dengan pemerintah Tiongkok, pemerintah Indonesia tidak mau langsung memberikan respon seperti mengutuk sikap pemerintah Tiongkok terhadap masyarakat Uighur sebab hubungan kedua negara sedang dalam keadaan dekat sebagai mitra. Meskipun banyak masyarakat Indonesia mendesak pemerintah mereka untuk mengambil sikap tegas pada pemerintah Tiongkok, Presiden Joko Widodo dengan kabinetnya hanya bersikap abu-abu dalam menanggapi. Sikap yang diperlihatkan pemerintah Indonesia itu bisa dibilang realistis karena hubungan antar kedua negara sangat dekat. Sikap realistis tersebut dapat dipahami dengan beberapa indikator dari pemikiran Valerie M. Hodson dalam hubungan antar negara perlu dilakukan.

2.1 Faktor Ukuran Wilayah Negara Indonesia yang Menyebabkan Indonesia Bersikap Netral terhadap Kasus Uighur dalam Hubungan Bilateral dengan Tiongkok

Ukuran wilayah negara memberikan pengaruh terhadap kebijakan politik yang akan ditetapkan oleh negara. Dalam segi ukuran wilayah, negara berukuran

kecil akan lebih memfokuskan kebijakan politik luar negerinya kepada negara-negara berukuran besar sebab rata-rata negara kecil itu miskin sehingga mendorong mereka untuk bekerja sama dengan negara-negara yang lebih besar dari mereka dengan melakukan hubungan diplomasi. Pada umumnya, negara-negara kecil akan bersikap netral karena mereka tidak mampu untuk mengapresiasi serta memberikan sanksi kepada negara lain. Sedangkan negara-negara besar dinilai lebih terlihat pada politik luar negerinya untuk memajukan potensi-potensi nasional serta memenuhi kebutuhan ekonomi yang lebih besar juga karena wilayahnya lebih besar dan penduduknya lebih padat dari negara-negara kecil (M.Hudson, 2014).

Ukuran wilayah Tiongkok dengan Indonesia memiliki perbandingan yang sangat jauh berbeda baik wilayah daratan maupun lautannya. Ukuran wilayah Tiongkok keseluruhan mencapai 9.596.961 km² sedangkan ukuran wilayah Indonesia keseluruhan hanya mencapai 1.904.569 km² (UNSD, n.d.). Perbedaan ukuran kedua negara tersebut begitu terjal bagaikan langit dan bumi sehingga potensi kekayaan alam yang dimiliki Tiongkok jauh lebih melimpah dibandingkan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Dengan memiliki wilayah daratan yang lebih luas, Tiongkok memiliki jumlah tumbuh-tumbuhan lebih banyak yang tersebar di seluruh wilayahnya daripada Indonesia

Indonesia dikenal dengan negara kepulauan paling besar di dunia yang memiliki jumlah pulau sebanyak 17.499 pulau. Jumlah pulau Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua samudera menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan akan sumber daya alam yang begitu banyak baik di darat maupun di laut. Tercatat luas lautan wilayah yuridiksi Indonesia seluas 5,8 juta km² dan garis pantai sepanjang sekitar 81.000 km sehingga dapat disimpulkan bahwa

betapa kayanya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia untuk dimanfaatkan dalam kehidupan bernegara. Dengan kayanya akan sumber daya alam, wilayah Indonesia kerap menjadi sasaran utama aktor-aktor internasional dari negara lain dalam program investasi dan ekonomi mereka (Haryanto, 2015). Biasanya negara-negara berkembang yang memiliki wilayah besar dan luas akan memanfaatkan kekayaan alamnya pada wilayahnya tersebut dalam melakukan diplomasi dengan negara-negara lain. Negara yang memiliki wilayah besar maka potensi akan sumber daya alamnya melimpah sehingga kegiatan ekspor dari hasil sumber daya alam menjadi keuntungan besar dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Sebagai negara berkembang, besarnya ukuran wilayah Indonesia membuat pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan hasil sumber daya alam baik darat ataupun laut guna diekspor ke negara-negara lain agar mendapatkan pemasukan negara. Besarnya wilayah dan melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia memungkinkan banyak dari negara lain ingin memiliki sebagian kekayaan alam Indonesia untuk memenuhi kebutuhan domestik mereka. Dengan demikian, ukuran wilayah Indonesia akan selalu menjadi bahan pertimbangan bagi negara-negara lain untuk melakukan hubungan diplomatik karena sumber daya alamnya yang sangat melimpah ruah. Negara-negara kecil akan bekerjasama dengan Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya karena kekurangannya akan sumber daya alam sedangkan negara-negara berkembang dan maju akan bekerjasama guna mendapatkan bahan olahan lebih yang akan menghasilkan barang dan makanan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan demikian, Tiongkok yang memiliki ukuran yang lebih besar memiliki power lebih kuat daripada Indonesia.

2.2 Faktor Sumber Daya Alam Indonesia yang Menyebabkan Indonesia bersikap Netral terhadap Kasus Uighur dalam Hubungan Bilateral dengan Tiongkok

Sumber daya alam merupakan kekayaan yang dihasilkan dari alam untuk memenuhi kepentingan nasional dari masing-masing negara. Sumber daya alam akan selalu menjadi target penting yang harus dicapai oleh negara melalui pemerintahnya. Banyak dari negara-negara yang dinilai kuat mencari sumber daya alam di wilayah negara yang dimana tidak dimilikinya di wilayah sendiri ataupun tidak mampu mencukupi kebutuhan domestiknya; seperti Tiongkok melakukan kontrak minyak kepada Sudan dan Libya yang melakukan pendekatan dengan Irak guna mengambil kandungan uranium. Daratan yang subur akan tanahnya juga menjadi target penting sebagai salah satu tempat penghasil sumber daya alam. Hal itu pernah dilakukan oleh Uni Soviet terhadap Ukraina dan Vietnam terhadap Kamboja dimana kedua negara tersebut memanfaatkan tanah subur negara lain untuk menghasilkan kebutuhan makanan domestiknya masing-masing (M.Hudson, 2014).

Luas dan besarnya wilayah Indonesia yang terdiri dari tanah subur dan lautan menunjukkan bahwa sumber daya alam milik Indonesia sangatlah melimpah. Kekayaan laut dan daratan (pertanian) Indonesia menghasilkan berbagai macam bahan sandang, pangan dan papan yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia; antara lain karet, sawit, migas, dan lain sebagainya. Indonesia menjalin

kerjasama ekonomi dengan Tiongkok karena Indonesia sangat membutuhkan bantuan dari Tiongkok dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya. Untuk memudahkan kerjasama ekonomi, Indonesia dengan Tiongkok membuat persetujuan tentang *free trade* yaitu zona wilayah yang diberlakukannya perdagangan secara bebas. Terdapat beberapa poin dalam *free trade*; antara lain: 1) meminimalisir biaya tarif dan non tarif dalam melakukan perdagangan., 2) mempermudah akses pasar yang berupa jasa., 3) kesepakatan yang mengatur kegiatan investasi., 4) kegiatan ekonomi yang mampu membantu mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di kawasan. Keberadaan *free trade* memberikan dampak negatif dan positif bagi Indonesia. Dampak negatifnya ialah ketika produk impor memenuhi pasar lokal sementara produk lokal tidak mampu menyaingi kualitas dari produk impor. Sedangkan dampak positifnya ialah Indonesia dapat meningkatkan kemampuan ekspornya ke luar negeri. Akan tetapi, nilai ekspor dan impor Indonesia mendapati jumlah yang defisit dimana nilai ekspor lebih kecil dari nilai impornya dimana Indonesia menjual produknya lebih sedikit dari produk yang dibeli dari Tiongkok (Mayadewi, 2020).

Menurut laporan BPS, data ekspor Indonesia dengan Tiongkok pada bulan Desember 2018 tercatat sebesar 13.841.304.426 kilogram dan jika diuangkan mencapai USD 27.126.932.427: Jumlah yang begitu besar dalam kegiatan transaksi ekspor antar negara (Statistik, 2018). Dari data tersebut menunjukkan Tiongkok menjadi salah satu negara tujuan favorit bagi ekspor Indonesia. Ekspor Indonesia ke Tiongkok mencapai lebih dari 13 ribu ton berat bersih dari total barang yang diekspor secara keseluruhan pada Desember 2018. Jumlah ekspor Indonesia ke Tiongkok telah jauh meninggalkan jumlah ekspor Indonesia ke negara-negara

lainnya sehingga dapat dilihat bahwa Indonesia sangat membutuhkan Tiongkok dalam hal kerjasama ekonominya karena jumlah eksportnya yang sangatlah fantastis. Jika Indonesia memberhentikan hubungannya dengan Tiongkok sebagai upaya protes kepada pemerintah Tiongkok untuk membela suku Uighur, maka Indonesia bisa dikatakan sangatlah merugi bagi perekonomian Indonesia karena jumlah ekspor Indonesia menjadi turun secara drastis. Begitu besarnya jumlah ekspor ke Tiongkok, pemerintah Indonesia tentu tidak ingin melepaskan begitu saja hanya karena konflik Uighur yang dianggap sebagai konflik yang terjadi di wilayah domestik Tiongkok sehingga menjadi masalah dalam negeri Tiongkok dimana intervensi dari negara-negara tidak diperbolehkan dalam aturan hukum internasional. Bersikap Netral pada kasus Uighur menjadi solusi paling masuk akal bagi Indonesia supaya kerjasama ekonomi ini tetap berjalan serta jumlah ekspor ke Tiongkok bisa berkembang dan semakin bertambah pada masa depan. Oleh karena itu, jumlah ekspor Indonesia ke Tiongkok menjadi kunci utama pemerintah Indonesia mempertahankan hubungan (ekonomi) dengan Tiongkok dari segi sumber daya alam.

2.3 Faktor Geografi Wilayah Indonesia yang Menyebabkan Indonesia Bersikap Netral terhadap Kasus Uighur dalam Hubungan Bilateral dengan Tiongkok

Geografis merupakan bentuk alam yang terletak suatu wilayah negara seperti gunung, dataran tinggi, pantai, laut, hutan, dan lain sebagainya. Geografis bisa diasumsikan sebagai tempat yang berisikan berbagai sumber daya alam sesuai bentuk alam tertentu. Masing-masing negara memiliki geografis yang berbeda

sehingga membuat negara tidak akan selalu mampu memenuhi kebutuhan domestiknya dengan mengandalkan geografisnya saja karena memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Geografis sering menjadi pemicu konflik antar negara seperti peristiwa invasi Afghanistan karena wilayahnya merupakan jalan utama yang menyambungkan antara Timur Tengah dan Asia. Geografis menentukan bagaimana batas-batas wilayah dari suatu negara. Semakin banyak perbatasan dengan negara lain, maka semakin banyak konflik yang akan terjadi (M.Hudson, 2014).

Geografis Indonesia memiliki potensi dalam perdagangan dimana Indonesia terletak di dua benua dan di dua samudera berbeda, yaitu Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia dan Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia memanfaatkan letak geografisnya tersebut untuk mempererat kerjasamanya dengan Tiongkok. Namun, dengan banyaknya perbatasan yang dimiliki Indonesia, terjadi beberapa konflik perbatasan, salah satunya kasus perairan Natuna. Dalam kasus perairan Natuna, Indonesia terlihat begitu dekat dengan Tiongkok dalam hal ekonomi tetapi sikap Indonesia terhadap Tiongkok terkait kasus Laut China Selatan berbanding terbalik daripada hal yang menyangkut ekonomi. Indonesia tetap teguh dengan pendiriannya untuk tidak mengakui klaim Tiongkok atas perairan Natuna dimana Tiongkok mengklaim sebagian perbatasan utara perairan Natuna termasuk wilayah laut miliknya. Dalam kasus ini, pemerintah Indonesia telah melakukan tindakan tegas terhadap kapal-kapal negara lain yang mengambil ikan tanpa izin negara. Ada beberapa alasan bagi Indonesia untuk mempertahankan perairan Natuna sebab Indonesia memiliki kepentingan nasional di wilayah laut tersebut sehingga pemerintah bertindak tegas bagi siapa saja dari pihak asing yang melanggar (Andika, 2017). Dalam hal ini, pemerintah Indonesia

bersikap tegas namun ingin menyelesaikannya dengan damai sebab Tiongkok memiliki power yang lebih kuat dari Indonesia.

BAB III
ALASAN INDONESIA MEMERLUKAN TIONGKOK DARI FAKTOR
DEMOGRAFI, SISTEM POLITIK, KEMAMPUAN MILITER, DAN
KEMAMPUAN EKONOMI

3.1 Faktor Demografi Wilayah Indonesia yang Menyebabkan Indonesia Bersikap Netral terhadap Uighur dalam Hubungan Bilateral dengan Tiongkok

Demografi adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tertentu. Demografi menjadi salah satu indikator yang dapat memengaruhi kebijakan politik luar negeri dari suatu negara. Populasi masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap negara seperti etnis, agama, pendidikan, Kesehatan dan lain sebagainya (M.Hudson, 2014). Demografi dapat diartikan sebagai identitas dari masyarakat suatu negara yang dinamakan sebagai identitas nasional. Indonesia memiliki beberapa identitas nasional seperti budaya, suku dan agama. Salah satu identitas yang paling lekat dengan masyarakat Indonesia adalah agama. Nilai-nilai keagamaan banyak tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Di samping itu, semboyan yang terletak pada lambang negara yaitu “Bhinneka Tunggal Ika” memaknai kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki banyak perbedaan baik suku, budaya, ras dan agama; dapat hidup dengan damai dan menghargai satu sama lain. Unsur-unsur yang terkandung dalam UUD, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa ajaran-ajaran agama menjadi pedoman Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara. Dengan demikian, agama telah menjadi identitas paling nampak dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia (Sormin, 2021).

Demografi Indonesia diidentikkan dengan masyarakat yang taat beragama

dimana umat dari setiap agama sering melaksanakan ibadahnya masing-masing. Adanya slogan “Bhinneka Tunggal Ika” memperkuat masyarakat yang agamis. Di sisi lain, kebijakan pemerintah Indonesia terlihat terlalu bergantung dengan Tiongkok sehingga memunculkan mindset Tiongkok sentris. Ada dua ideologi yang terbentur dimana identitas masyarakat dengan pemerintah Indonesia bentrok sehingga terjadi demonstrasi yang berlangsung cukup lama. Bentrok tersebut membuat pemerintah Indonesia sulit untuk mempertahankan stabilitas politik luar negeri sehingga bersikap netral menjadi jalan tengah dalam menyelesaikan bentrok tersebut.

3.2 Faktor Sistem Politik Indonesia yang Menyebabkan Indonesia Bersikap Netral terhadap Uighur dalam Hubungan Bilateral dengan Tiongkok

Sistem politik merupakan suatu sistem yang mengurus semua struktur administrasi negara dalam menentukan kemana arah kebijakan politik terutama politik luar negeri. Demokrasi termasuk salah satu sistem politik yang mengatur negara dimana setiap masyarakatnya memiliki hak untuk dapat memilih pemimpin negara seperti Saddam Husein yang terpilih sebagai Presiden Irak waktu pra-invasi di tahun 2003. Saddam Husein terpilih menjadi presiden dengan memenangkan suara hingga 97 persen. Hal itu menunjukkan demokrasi yang asli sebab demokrasi tersebut menciptakan perdamaian demokratis. Demokrasi bertujuan untuk menghindari konflik (M.Hudson, 2014).

Indonesia terkenal diidentik dengan masyarakat yang agamis. Namun identitas tersebut bertabrakan dengan politik luar negeri dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini, munculnya Gerakan 212 akibat kasus Ahok yang menista agama Islam membuat pemerintah sulit menentukan sikap. Gerakan 212 merupakan gerakan umat muslim Indonesia yang dikomandoi oleh Habib

Rizieq Syihab. Pada awalnya, gerakan ini dinamai Aksi Bela Islam untuk membela agama Islam yang sudah dinistakan oleh Ahok yang menyinggung ajaran Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 51 (Adam, 2022). Kasus Ahok tersebut mempengaruhi bagaimana umat muslim bersuara dimana isu Uighur juga menjadi persoalan bagi umat muslim untuk menekan pemerintah. Demokrasi yang dibuat untuk perdamaian mendorong pemerintah Indonesia untuk berdamai dengan masyarakat Indonesia yang sedang melakukan demonstrasi. Dalam hal ini, pemerintah bersikap netral dalam isu Uighur agar masyarakat tidak tampak memihak Tiongkok tetapi juga dapat berhubungan baik dengan Tiongkok karena kebergantungannya yang kuat.

3.3 Faktor Kemampuan Militer Indonesia yang Menyebabkan Indonesia Bersikap Netral terhadap Uighur dalam Hubungan Bilateral dengan Tiongkok

Kemampuan militer merupakan level kekuatan negara dalam mempersiapkan angkatan militernya untuk memenuhi kebijakan politik di dalam dan luar negeri sebagai perisai kedaulatan dari masing-masing negara. Beberapa orang mengungkapkan argumennya yang menunjukkan bahwa menggunakan kekuatan militer merupakan cara yang lebih mudah dalam mencapai kepentingan nasional di wilayah negara lain seperti Amerika Serikat yang melakukan invasi terhadap Irak dan Israel yang merebut paksa wilayah kekuasaan Palestina dimana keduanya melakukannya tanpa adanya anjuran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Permasalahan terbesar bagi dunia internasional adalah ketika senjata biologis dan nuklir sudah digunakan suatu negara untuk mencari keuntungan dari

wilayah negara lain. Negara yang memiliki senjata nuklir patut untuk diperhatikan dalam segi militer dan diplomasi (M.Hudson, 2014). Dengan demikian, kekuatan militer menjadi perhitungan nomor satu dalam permasalahan yang terjadi di berbagai belahan dunia karena kekuatannya dapat memberikan dampak berupa kehancuran bagi alam serta makhluk hidup yang terkena dampaknya.

Kekuatan militer mampu merusak ekosistem alam dimana makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan bergantung hidupnya pada kondisi alam sehingga ketika suatu wilayah terkena dampak dari senjata militer maka ekosistem alam pada wilayah tersebut pun akan hancur hingga musnah. Maka dari itu, mempersiapkan kekuatan militer untuk menghadapi permasalahan negara merupakan hal yang harus diperhatikan supaya kekayaan yang dimiliki negara tidak akan hilang secara sia-sia tanpa bisa menikmatinya. Dalam hal kekuatan militer, Indonesia harus memperbanyak patroli di wilayah teritorial terutama wilayah yang berupa laut sebab mayoritas batas negara Indonesia dengan negara lain itu berupa laut sehingga pemerintah Indonesia perlu mengerahkan banyak personil untuk memperkuat keamanan negara di wilayah laut terutama wilayah laut Natuna dimana Indonesia dengan Tiongkok berselisih terkait perbatasan negara di wilayah perairan tersebut. Dengan demikian, pemerintah Indonesia mengambil sikap berbeda antara masalah perbatasan negara di laut Natuna dengan kerjasama ekonomi dimana Indonesia terlihat sangat akrab dalam urusan ekonomi tetapi masih melakukan perundingan dalam kasus laut Natuna supaya perselisihan batas negara dapat diselesaikan secara damai.

Dalam segi kekuatan militer, kekuatan Tiongkok masih jauh lebih kuat dari kekuatan Indonesia. Tiongkok termasuk 5 negara dengan kekuatan militer terkuat

di dunia sedangkan Indonesia hanya masuk dalam 20 besar. Peringkat kekuatan militer dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Ranking Kekuatan Militer Dunia 2018

Peringkat	Negara	Peringkat	Negara
1	Amerika Serikat	11	Italia
2	Rusia	12	Mesir
3	Tiongkok	13	Iran
4	India	14	Brazil
5	Perancis	15	Indonesia
6	Britania Raya	16	Israel
7	Korea Selatan	17	Pakistan
8	Jepang	18	Korea Utara
9	Turki	19	Spanyol
10	Jerman	20	Vietnam

Sumber: GlobalFirepower.com (1 April 2023) (Military Powers Ranked, n.d.)

Dalam tabel tersebut, Tiongkok menempati peringkat 3 dalam segi kekuatan militer terkuat di antara negara-negara dunia sedangkan Indonesia menempati peringkat 15 yang terpaut peringkat cukup jauh. Meskipun peringkat terpaut jauh, Indonesia memiliki kekuatan militer yang lebih lemah dari Tiongkok. Oleh sebab itu, Indonesia tidak dapat memandang remeh kekuatan militer Tiongkok sehingga hal itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah Indonesia dalam menentukan sikap atau kebijakan luar negeri Indonesia.

3.4 Faktor Kemampuan Ekonomi Indonesia yang Menyebabkan Indonesia Bersikap Netral terhadap Uighur dalam Hubungan Bilateral dengan Tiongkok

Kemampuan ekonomi merupakan kekayaan yang dimiliki suatu negara dalam sektor ekonomi. Ekonomi tidak kalah penting dengan kekuatan militer karena dependensi negara pada sektor ekonomi dalam menerapkan semua kebijakan politiknya. Satu kasus dependensi negara terhadap sektor ekonomi adalah invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak demi mencapai kepentingan nasionalnya terkait Halliburton. Invasi tersebut dilakukan agar Amerika Serikat mendapatkan keuntungan besar untuk kepentingannya. Dependensi negara dengan ekonomi lebih sering tampak pada negara-negara ketiga dan maju untuk memenuhi kebutuhannya dimana negara-negara minim akan sumber daya alam sedangkan negara-negara maju butuh sumber daya alam yang lebih untuk kebutuhan dari banyaknya penduduk ataupun kebutuhan bahan produksi. Untuk menjalankan perekonomiannya; banyak dari negara-negara yang memiliki wilayah tanah subur (luas atau tidak begitu luas) tetapi belum bisa dikategorikan sebagai negara maju dapat menggunakan kekayaan negara mereka berupa sumber daya alam dalam menentukan kebijakan politik luar negeri mereka ketika pemerintah mereka melakukan diplomasi terhadap negara lain baik negara ketiga, negara berkembang maupun negara maju (M.Hudson, 2014). Di sisi lain, ada beberapa negara ketiga dan berkembang belum mampu mengolah sumber daya alam yang mereka miliki sehingga membutuhkan bantuan dari negara-negara maju yang memiliki teknologi lebih canggih. Dengan kekurangan tersebut, kerjasama antar negara merupakan salah satu jalan yang diperlukan bagi negara-negara ketiga

dan berkembang demi kepentingan nasionalnya yang selalu bergantung pada ekonomi.

Hasil kekayaan alam Indonesia begitu melimpah namun Indonesia tetap membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Dalam hal itu, Indonesia melakukan impor dari beberapa negara lain. Hal itu dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2: Data Nilai Impor Indonesia dari Tiongkok Tahun 2014-2018

Tabel 1: Nilai impor Indonesia menurut negara asal utama 2014-2018 (juta US\$)

No.	Negara Asal	Tahun				Total	
		2014	2015	2016	2017		2018
1.	China	30.624,3	29.410,9	30.800,5	35.766,8	45.537,8	172.140,3
2.	Singapore	25.185,7	18.022,5	14.548,3	16.88,5	21.439,5	96.084,5
3.	Japan	17.007,6	13.263,5	12.948,8	15.240,0	17.976,8	76.472,7
4.	Thailand	9.781,0	8.083,4	8.666,9	9.281,6	10.952,8	46.765,8
5.	Republic of korea	11.847,4	8.427,2	6.674,6	8.122,3	9.088,9	44.160,4
6.	Malaysia	10.855,4	8.530,7	7.200,9	8.858,2	8.602,9	44.048,1
7.	United States	8.170,1	7.593,2	7.298,4	8.121,6	10.176,0	41.359,6
8.	Australia	5.647,5	4.815,8	5.260,9	6.008,9	5.825,5	27.558,6
9.	Saudi Arabia	6.516,2	3.421,6	2.725,0	3.167,0	4.910,7	20.740,6
10.	India	3.952,1	2.741,4	2.872,7	4.048,5	5.016,9	18.631,7
	Lainnya	48.591,5	38.384,6	36.619,8	41.481,9	49.183,3	214.261,0
	Total	178.178,8	142.694,8	135.652,8	156.985,6	188.711,4	802.223,4

Sumber: <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA> (Widiyanto, 2019)

Tabel diatas menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ketergantungan pada Tiongkok dengan jumlah impor yang fantastis. Pada tahun 2014 hingga 2018, Tiongkok menjadi mitra dagang utama bagi pemerintah Indonesia dalam hal mengimpor barang dengan jumlah mencapai 172.140,3 US\$. Dengan melihat jumlah impor Indonesia dari Tiongkok yang sangat besar serta teknologi yang Tiongkok lebih canggih , pemerintah Indonesia tidak ingin hubungan antar keduanya menjadi buruk. Oleh karena itu, pemerintah lebih memilih bersikap Netral dalam merespon kasus Uighur tersebut.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hubungan Indonesia dengan Tiongkok menjadi erat ketika Presiden Joko Widodo berkuasa sejak 2014 dimana ia pergi ke Tiongkok dalam kunjungan luar negeri pertamanya pada acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC pada tanggal 8 November 2014. Presiden Joko Widodo telah bersepakat dengan pemerintah Tiongkok terkait proyek buatan Tiongkok yang bernama Silk Road China dan mendukung adanya AIIB sebagai bank penyokong dana proyek itu. Orientasi kebijakan luar negeri dari pemerintahan Presiden Widodo dimana "Diplomasi membumi" atau disebut "Diplomasi pro-rakyat. Ia melihat Indonesia perlu melakukan diplomasi dengan Tiongkok karena Tiongkok dipandang sebagai negara yang mampu membantu pemerintahnya dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri secara merata dan menyeluruh. Tiongkok dinilai mampu membantu perekonomian Indonesia agar berjalan lebih maju dari sebelumnya. Kerjasama bilateral yang semakin intens antara Indonesia dengan Tiongkok membuat produk-produk asal Tiongkok membanjiri pasar-pasar serta inventasi besar-besaran di berbagai wilayah Indonesia. Meskipun begitu, Indonesia memerlukan Tiongkok untuk menjadi tujuan ekspornya dimana Tiongkok menjadi lima negara teratas sebagai tujuan ekspor dari produk-produk dalam negeri mencapai US\$27,127 juta pada tahun 2018. Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri bahwa Tiongkok dapat menjadi mitra dagang utama bagi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Valerie M.Hudson mengungkapkan pemikirannya bahwa ada beberapa indikator penting yang dimiliki suatu negara dalam membuat kebijakan luar

negerinya. Ia menyebutkan ada 7 indikator yaitu ukuran, sumber daya alam, geografi, demografi, sistem politik, kemampuan militer, dan kemampuan ekonomi. Ketujuh indikator tersebut dapat menjelaskan mengapa Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya tidak menanggapi konflik Uighur. Valerie memiliki pendapat bahwa negara yang memiliki wilayah kecil akan lebih memikirkan kebijakan politik luar negerinya kepada negara-negara yang memiliki wilayah besar sebab kebanyakan negara-negara kecil itu miskin sehingga keadaan itu memaksa mereka untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara yang lebih besar dari mereka. Pada kenyataannya, negara-negara kecil akan cenderung bersikap netral pada negara lain sebab mereka tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih serta menjatuhkan sanksi kepada negara-negara lain yang lebih besar. Sebaliknya, negara-negara besar akan tampak lebih fokus pada politik luar negerinya guna memanfaatkan potensi-potensi nasionalnya serta mencukupi kebutuhan ekonomi dalam negeri karena memiliki wilayah yang lebih besar dengan penduduk yang lebih banyak.

Ukuran wilayah negara Indonesia dengan wilayah negara Tiongkok memiliki kesenjangan yang sangat jauh dimana Indonesia hanya memiliki wilayah keseluruhan sebesar 1.904.569 km² sedangkan wilayah Tiongkok mencapai 9.596.961 km² secara keseluruhan. Dari segi ukuran, Indonesia kalah jauh dengan Tiongkok sehingga Tiongkok memiliki potensi lebih besar dalam hal sumber daya alam sebab wilayahnya yang lebih luas. Dengan ukuran wilayah lebih luas, tidak dapat dibantah bahwa Indonesia akan memerlukan Tiongkok sebagai mitra

dagangnya guna memenuhi kebutuhan dalam negerinya karena sumber daya alamnya yang lebih banyak daripada wilayah sendiri. Sumber daya alam merupakan kekayaan yang berasal dari alam guna mencukupi kebutuhan nasional dari setiap negara. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, suatu negara memiliki sumber daya alam yang terbatas dimana negara A tidak memiliki sumber daya alam yang dimiliki oleh negara B atau negara A tidak dapat mencukupi kebutuhan nasional karena penduduknya yang begitu banyak sehingga membutuhkan negara B guna menambal kekurangan tersebut. Hal itu dapat dilihat bagaimana kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Tiongkok. Geografis merupakan bentuk alam yang dapat menentukan kebijakan politik negara. Alam membatasi antara negara dengan negara lain. Apabila negara memiliki perbatasan yang lebih banyak dengan negara lain, maka akan cenderung terjadinya konflik. Dalam hal ini, Indonesia berkonflik dengan Tiongkok terkait perairan Natuna dimana Indonesia ingin menyelesaikannya dengan damai sebab Tiongkok memiliki pengaruh besar bagi Indonesia.

Dalam hal demografi, Indonesia terkenal dengan negara mayoritas masyarakat beragama islam sehingga konflik Uighur menjadi satu satu pembicaraan penting bagi setiap warga negara Indonesia sebab UUD 1945 dan Pancasila berisikan nilai-nilai keagamaan. Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang memiliki makna kehidupan damai masyarakat Indonesia dengan adanya perbedaan suku, budaya, ras, dan agama; mendorong sebagian masyarakat Indonesia untuk

mendesak pemerintah Indonesia bersikap tegas kepada pemerintah Tiongkok atas perilaku buruknya terhadap suku Uighur. Bentrok antara masyarakat agamis dengan kebijakan pemerintah yang Tiongkok sentris membuat pemerintah sulit untuk bersikap. Demokrasi yang bertujuan untuk perdamaian dengan menghindari konflik membuat pemerintah bersikap netral. Dengan sistem demokrasi, pemerintah Indonesia ingin menyelesaikan demonstrasi yang dilakukan masyarakat Indonesia dengan bersikap netral agar tidak tampak memihak sebab jika ia salah mengambil sikap maka stabilitas politik dalam negeri dapat terganggu. Dalam segi kekuatan militer, Indonesia yang menduduki peringkat 15 pada tahun 2018 tertinggal jauh dari Tiongkok yang menduduki peringkat 3 terkuat di dunia sehingga sulit bagi Indonesia dalam menghadapi Tiongkok jika terjadi konflik antar kedua negara dengan menggunakan kekuatan militer. Oleh karena itu, damai dengan Tiongkok dinilai lebih baik bagi kepentingan Indonesia. Dalam segi ekonomi, Indonesia memiliki banyak kekurangan jika dibandingkan dengan Tiongkok. Terdapat 3 poin penting dalam hal ekonomi Indonesia. Pertama, kualitas produk-produk Tiongkok jauh lebih bagus daripada produk dalam negeri. Kedua, kebutuhan masyarakat Indonesia lebih besar dari hasil kekayaan alam dalam negeri. Ketiga, Tiongkok menjadi tujuan ekspor yang menguntungkan bagi Indonesia karena besarnya nominal daripada negara-negara lain. Ketiga poin itu mendorong pemerintah Indonesia untuk bekerjasama dengan Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan nasional serta mendapatkan keuntungan yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.

4.2 Rekomendasi

Tulisan ini dibuat karena belum ada peneliti yang membahas kebijakan

pemerintah Indonesia terhadap kasus Uighur dengan pemikiran Valerie M.Hudson sehingga mendorong penulis untuk menulis tulisan ini. Tentunya tulisan ini memiliki kekurangan-kekurangan sehingga penulis memiliki harapan bahwa ada penulis lain yang mampu menyempurnakannya bahkan menggunakan dengan menggunakan perspektif dari pemikiran-pemikiran tokoh lain. Penulis berharap semoga tulisan ini akan bermanfaat bagi pada pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Y. F. (2022, Desember). Islam dan Politik Identitas: Konflik pada Gerakan 212 dalam Perspektif Sejarah Indonesia. *Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 95-96.
- Andika, M. T. (2017). Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan? *Indonesian Perspective*, 2(2), 161-179.
- CNNIndonesia. (2019, Juni 21). *Riset: Indonesia Diam Soal Uighur karena Investasi China*. Retrieved from [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190621163906-106-405340/riset-indonesia-diam-soal-uighur-karena-investasi-china):
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190621163906-106-405340/riset-indonesia-diam-soal-uighur-karena-investasi-china>
- Dewi, N. R. (2020). Dinamika Kemanusiaan Muslim Uyghur di Cina. *Journal of Sosial Science Teaching*, 4(1).
- Dinamika Hubungan Kerja Sama Indonesia-Cina di Era Pemerintahan Joko Widodo. (2019, Maret). *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 15-24.
- Dwiafriyadi, A. (2018, 09 09). *Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Segini Jumlah Impor Minyak RI*. Retrieved from [detikfinance](https://finance.detik.com/energi/d-4204524/penuhi-kebutuhan-dalam-negeri-segini-jumlah-impor-minyak-ri):
<https://finance.detik.com/energi/d-4204524/penuhi-kebutuhan-dalam-negeri-segini-jumlah-impor-minyak-ri>
- Fadhillah, R. (2018, Desember 20). *Ini Sikap Pemerintah Indonesia Soal Pelanggaran HAM Menimpa Muslim Uighur*. Retrieved from [merdeka.com](https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-sikap-pemerintah-indonesia-soal-pelanggaran-ham-menimpa-muslim-uighur.html): <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-sikap-pemerintah-indonesia-soal-pelanggaran-ham-menimpa-muslim-uighur.html>
- Fariansyah, M. (2018, Desember 21). *Massa Bela Uighur Bakar Bendera China di Depan Kedubes*. Retrieved from [20.detik.com](https://20.detik.com/detikflash/20181221-181221070/massa-bela-uighur-bakar-bendera-china-di-depan-kedubes):
<https://20.detik.com/detikflash/20181221-181221070/massa-bela-uighur-bakar-bendera-china-di-depan-kedubes>
- Hamdani, T. (2018, 05 22). *China Pengimpor Sawit RI Ketiga Terbesar Dunia*. Retrieved from [detikfinance](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4033366/china-pengimpor-sawit-ri-ketiga-terbesar-dunia): <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4033366/china-pengimpor-sawit-ri-ketiga-terbesar-dunia>
- Haryanto, A. (2015). Faktor Geografis dan Konsepsi Peran Nasional sebagai Sumber Politik Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 136-147.
- Indonesia, C. (2018, Desember 18). *Diam Soal Muslim Uyghur, RI Dinilai Bergantung pada China*. Retrieved from [m.cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181218160644-106-354585/diam-soal-muslim-uighur-ri-dinilai-bergantung-pada-china):
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181218160644-106-354585/diam-soal-muslim-uighur-ri-dinilai-bergantung-pada-china>
- Indonesia, C. (2019, September 26). *Puluhan Anggota PBB Kecam Sikap Represif China ke Uighur*. Retrieved from [m.cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190926085254-134-434140/puluhan-anggota-pbb-kecam-sikap-represif-china-ke-uighur):
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190926085254-134-434140/puluhan-anggota-pbb-kecam-sikap-represif-china-ke-uighur>
- Karisma, G. (n.d.). Konflik Etnis di Xinjiang: Kebijakan Monokultural dan Kepentingan Negara China terhadap Keutuhan Wilayah. *Jurnal Sisiologi*, 19(1), 41-52.
- Lee, R. (2015). *Muslims in China and their Relations with the State*. Al Jazeera Centre for Studies.

- M.Hudson, V. (2014). *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory* (2 ed.). Rowman dan Littlefield.
- Mardhiyyah, I. (2023, Januari). Diplomasi Ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok pada Masa Kabinet Kerja 2014-2019. *Padjajaran Journal of International Relations*, 1-17.
- Mayadewi, A. (2020). Analisis Perbandingan Ekspor dan Impor Komoditi Unggulan Indonesia-China Sebelum dan Setelah Penerapan ACFTA. *E-Jurnal EP Unud*, 31-60.
- Military Powers Ranked*. (n.d.). Retrieved from GlobalFirepower.com: <https://www.globalfirepower.com/global-ranks-previous.php>
- Munatama, A. (2023, April). Analisis Kerjasama Bilateral Sosial Politik China dan Indonesia dalam Masa Kepemimpinan Joko Widodo 2014-2020. *Jurnal Artefak*, 77-88.
- Permana, F. E. (2020, Juli 18). *Peneliti Barat Ungkap Mengapa Negara Islam Diam Soal Uyghur*. Retrieved from m.republika.co.id: <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/dunia/qdo2eb320/peneliti-barat-ungkap-mengapa-negara-islam-diam-soal-uyghur>
- Pradityo, R. (2020). Indonesia di Antara Masalah Etnis Rohingya dan Etnis Uighur, 2014-2019. *Indonesian Perspective*, 138-158.
- Pradityo, R. (2020, Juli-Desember). Indonesia di Antara Masalah Etnis Rohingya dan Etnis Uighur, 2014-2019. *Indonesian Perspective*, 5(2), 138-158.
- Pradityo, R. (2020, Juli-Desember). Indonesia di Antara Masalah Etnis Rohingya dan Etnis Uyghur, 2014-2019. *Indonesian Perspective*, 5(2), 138-158.
- Rezkisari, I. (2019, Desember 19). *Saatnya Indonesia Desak PBB Terkait Muslim Uighur*. Retrieved from republika.co.id: <https://republika.co.id/berita/q2prlk328/saatnya-indonesia-desak-pbb-terkait-muslim-uyghur>
- Sormin, Y. (2021). Identitas Nasional Sebagai Salah Satu Determinan Pembangunan dan Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7278-7285.
- Statistik, B. P. (2018). *Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Harmonized System, Desember 2018*. PT Citra Mawana Pataramo.
- UNSD. (n.d.). *unstats.un.org*. Retrieved from <https://unstats.un.org/unsd/environment/totalarea.htm>.
- Welle, D. (2019, Desember 18). *Dimana Posisi Indonesia Terkait Kasus Minoritas Uighur di Cina?* Retrieved from news.detik.com: <https://news.detik.com/dw/d-4826866/di-mana-posisi-indonesia-terkait-kasus-minoritas-uyghur-di-cina>
- Widiyanto, S. (2019). Analisis Impor Indonesia dari Negara Asal Utama dan Komoditi Utama 2014=2018. Retrieved from The World Bank.

